BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil Analisis dan Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2017 yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ditinjau dari Analisis Varians.

   Untuk Varians Pendapatan, rata-rata tertinggi dicapai oleh kabupaten OKU Selatan dan rata-rata terendah diperoleh kabupaten Ogan Ilir. Sementara untuk Varians Belanja, kabupaten OKU Timur yang mencapai rata-rata tertinggi dan kabupaten Ogan Ilir yang memperoleh nilai terendah.

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang ditinjau dari Rasio Pertumbuhan.

   Untuk Rasio Pertumbuhan Pendapatan, pemda yang menunjukkan pertumbuhan positif dengan dengan tren meningkat selama tahun 2012-2017 berjumlah 4 kabupaten/kota sedangkan pemda yang menunjukkan pertumbuhan positif dengan tren menurun ada 11 kabupaten/kota. Berdasarkan rata-rata, pemda kabupaten OKU Selatan menduduki peringkat pertama dengan nilai rata-rata 11% dan kabupaten Musi Banyuasin menjadi yang terendah dengan nilai 3%. Sedangkan untuk Rasio Pertumbuhan Belanja, pemda yang menunjukkan pertumbuhan positif dengan dengan tren meningkat selama tahun 2012-2017 berjumlah 3 kabupaten/kota sedangkan pemda yang menunjukkan pertumbuhan positif dengan tren menurun ada 12 kabupaten/kota. Berdasarkan rata-rata, pemda kabupaten OKI menduduki peringkat pertama dengan nilai rata-rata 10% dan kabupaten Musi Rawas menjadi yang terendah dengan nilai 1%.

3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang ditinjau dari Rasio Keuangan.

   a. Rasio Kemandirian Daerah

Kota Palembang menjadi daerah dengan tingkat rata-rata kemandirian tertinggi, sedangkan 4 kabupaten yaitu Ogan Ilir, OKU Timur, OKU Selatan, Empat Lawang menjadi daerah rata-rata kemandirian terendah.

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Kabupaten Banyuasin mendapat peringkat rata-rata teratas untuk ketergantungan daerah terhadap provinsi/pusat, sedangkan kota Palembang menjadi yang rata-rata terendah pada ketergantungan pemerintah daerah kepada provinsi/pusat.

c. Rasio Derajat Desentralisasi

Kota Pelambang berada pada peringkat rata-rata pertama, sedangkan yang rata-rata terendah adalah kabupaten Empat Lawang.

d. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Banyuasin berada pada peringkat rata-rata tertinggi, sedangkan terendah adalah kabupaten Ogan Ilir. Pemda dengan klasifikasi sangat efektif berjumlah 6 kabupaten/kota, pemda dengan klasifikasi efektif berjumlah 2 kabupaten/kota, pemda dengan klasifikasi cukup efektif berjumlah 5 kabupaten/kota, pemda dengan klasifikasi kurang efektif berjumlah 1 kabupaten/kota, pemda dengan klasifikasi tidak efektif berjumlah 1 kabupaten/kota.

e. Rasio Efektifitas Pajak Daerah

Kabupaten OKU Timur menduduki rata-rata peringkat tertinggi dan kabupaten Ogan Ilir Menjadi rata terendah. Pemda yang masuk dalam klasifikasi efektif berjumlah 12 kabupaten/kota dan pemda yang tidak efektif berjumlah 3 kabupaten/kota.

f. Rasio Belanja Operasi

Kabupaten OKU Timur menjadi kabupaten/kota yang mendapat rata-rata tertinggi dan kabupaten Empat Lawang menjadi yang terendah.

g. Rasio Belanja Modal

Kabupaten/kota yang menduduki peringkat rata-rata pertama adalah kabupaten OKU Selatan, sedangkan pemda yang menduduki peringkat terakhir adalah kabupaten OKU Timur.

h. Rasio Efisiensi Belanja

Seluruh kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selaten telah melakukan penghematan belanja karena rata-rata dibawah 100%.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah periode penelitian, sampel penelitian, atau melakukan penilaian kinerja atas komponen Laporan Keuangan selain LRA.

2. Bagi pemda khususnya pemda kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan agar lebih meningkatkan kinerja keuangannya dengan mengoptimalkan potensi daerahnya supaya tercapai kemandirian daerah yang tinggi serta pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Diharapkan pengukuran kinerja keuangan pemda menggunakan rasio keuangan dapat menjadi rekomendasi dan motivasi bagi seluruh pemda serta sebagai bahan koreksi dan masukan dalam pelaksanaan otonomi daerah.